BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Hubungan Internasional adalah suatu hubungan yang melewati batas suatu negara mencakup bidang yang multidimensi serta bersifat interdisipliner. Perkembangan hubungan internasional saat ini telah mengalami banyak perubahan, terutama pasca perang dingin yang merubah dan memunculkan corak baru dalam dinamika hubungan internasional. Dinamika hubungan internasional saat ini telah menunjukkan berbagai kecenderungan baru yang yang secara substansial sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya.

Globalisasi dinilai merupakan suatu hal yang menjanjikan karena globalisasi berkaitan dengan masalah transfer teknologi, pemindahan ideologi terutama dari negara maju ke negara dunia ketiga. Lima ciri pokok globalisasi yakni pertumbuhan pesat dalam transaksi keuangan internasional, pertumbuhan pesat dalam bidang perdagangan, khususnya perusahaan-perusahaan multinasional, gejolak investasi asing, teknologi komunikasi dan informasi serta transportasi yang semakin canggih dan munculnya pasar global.

Keterkaitan globalisasi dengan ekonomi juga tidak dapat dipungkiri. Isu ekonomi dalam dunia internasional mulai muncul setelah era pasca perang dingin yang ditunjukkan dengan munculnya pemikiran bahwa mekanisme pasar merupakan instrumen yang efisien dalam melakukan hubungan dan aktifitas ekonomi yang dapat diterima secara global.

Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia. Menurut sejumlah ahli jika perekonomian dunia ingin makmur dalam suasana yang berubah seperti sekarang perdagangan harus memainkan peranan vital.

Kegiatan perdagangan mampu menggantikan ekspansi wilayah dan perang militer sebagai kunci pokok menuju kesejahteraan dan pencapaian kekuasaan internasional. Manfaat perdagangan dan kerjasama internasional dewasa ini jauh melampaui manfaat persaingan militer dan perluasan wilayah.

Dengan berkembangnya hubungan internasional pasca perang dingin telah memunculkan isu-isu yang baru, salah satunya adalah mengemukanya hubungan yang bersifat "*Low Politics*". Pasca Perang dingin yang ditandai dengan berakhirnya persaingan Ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, telah mempengaruhi isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih fokus pada isu-isu *High Politics* (isu poltik dan keamanan) kepada isu-isu *Low Politics* (misalnya, Hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme) yang dianggap sudah sama penting dengan isu *High Politics* (Perwita dan Yani, 2005 : 5).

Perubahan ini mempengaruhi hubungan antar bangsa. Jika pada masa perang dingin isu-isu ideologis dan militer sangat dominan, maka pada era pasca perang dingin tema-tema seperti yang demikian semakin menyurut. Sebagai gantinya maka muncul isu-isu seperti HAM (Hak Asasi Manusia), politik-ekonomi dan demokratisasi sebagai indikator yang menentukan hubungan internasional.

Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas dunia merupakan dua arus yang saling mempengaruhi atau memperkuat satu dengan yang lainnya, yang saat ini sedang menghadang dunia. Dan kedua arus tersebut akan semakin kuat pada masa yang akan datang, seiring dengan kemajuan teknologi serta peningkatan pendapatan perkapita dan pertambahan jumlah penduduk dunia. Secara sederhana globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana semakin banyak negara di dunia yang terlibat langsung dengan kegiatan ekonomi dunia atau produksi dunia.

Munculnya dua arus ini mengubah tatanan perekonomian dan perdagangan dunia yang akan berpengaruh sangat kuat terhadap setiap negara, terutama yang menerapkan kebijakan perdagangan bebas atau ekonomi terbuka. Integrasi perdagangan antar negara meningkat pesat terutama pada tahun 1970-an, pada saat itu banyak negara mulai menerapkan sistem ekonomi terbuka yang di sebut era keterbukaan global. Akan tetapi, tidak semua negara mengalami laju pertumbuhan perdagangan internasional yang sama.

Ada negara yang mengalami pertumbuhan perdagangan luar negeri yang pesat, tetapi banyak negara yang tidak dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang muncul dari pertumbuhan perdagangania dunia. Dalam perkembangan ekonomi internasional, perdagangan merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan 2 kemajuan ekonomi negara-negara di dunia. Jika suatu negara ingin makmur maka perdagangan dunia merupakan salah satu cara untuk mencapainya, selain itu perdagangan dunia mempunyai peranan yang

sangat penting dalam menjaga hubungan kerjasama antar negara maju dengan negara berkembang terutama di bidang ekonomi.

Di era perdagangan bebas hampir semua negara berusaha untuk meningkatkan kapabilitas negaranya dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Salah satu cara yang di tempuh oleh negara tersebut adalah dengan melakukan aktivitas perdagangan internasional dimana terjadi ekspor dan impor barang keluar batas negara yang didasarkan pada prinsip perdagangan bebas. Negara-negara yang terlibat dalam proses perdagangan ini sering mengalami hambatan yang dapat ketika negara tersebut harus berhadapan dengan hukum suatu negara yang tidak sesuai dengan aturan hukum dagang di negara lain (Arifin, 2007:130).

Pergeseran paradigma yang terjadi di dalam hubungan internasional menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola hubungan suatu aktor dengan aktor lainnya. Dalam hal ini, yaitu dengan mengemukanya konsep regionalisme, dimana konsep ini menjadi sebuah konsep yang penting dalam hubungan antar aktor. Kerjasama kawasan saat ini menjadi kian penting, karena masalah-masalah menyangkut tata ekonomi dunia, hutang luar negeri, pertumbuhan ekonomi, arus modal, perdagangan menjadi sangat penting dalam mengatur pola hubungan antar aktor. Sehingga mendorong dunia berkembang dan dunia maju untuk melakukan kerjasama demi mempertahankan eksistensinya masing-masing. Sehingga tidak heran jika hingga saat ini banyak bermunculan blok-blok kekuatan ekonomi baru.

Banyak negara-negara saat ini yang sedang berusaha untuk mengurangi hambatan tarif dalam perdagangan internasional dan juga berusaha untuk

melakukan pengintegrasian ekonomi regional. Hasil dari usaha untuk menciptakan wilayah integrasi ekonomi tersebut adalah dimana negara-negara peserta dari integrasi tersebut dapat melakukan perdagangan internasional terhadap sesama negara anggota yang lain tanpa dikenakan biaya tanpa dikenakan biaya tambahan atau hambatan tarif. Hal ini telah diterapkan oleh sejumlah blok perdagangan seperti *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), *Asia Pasifik Economic Coorporation* (APEC), *Europe Free Trade Area* (EFTA), dan *North America Free Trade Area* (NAFTA).

ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) adalah sebuah bentuk kerjasama di bidang ekonomi antar negara Cina dengan negara-negara anggota ASEAN, khususnya dalam hal ini adalah kerjasamanya dengan Indonesia. ACFTA mencakup 1,9 Milyar konsumen, dengan PDB regional ketiga di dunia setelah Uni Eropa dan NAFTA, merupakan formalisasi dari proses integrasi perekonomian kawasan yang sudah berjalan dimana Cina adalah mitra penting bagi ASEAN dan begitu pula sebaliknya. Bagi Indonesia, Cina dan ASEAN berpotensi untuk menyerap 30% pasar ekspor dan pemasok 48% dari kebutuhan impor (http://blogs.unpad.ac.id/yogix/2010/03/12/bagaimana-mekanisme-acfta-2010/ - Diakses pada 12 April 2010).

Kesepakatan pembentukan perdagangan bebas ACFTA diawali oleh kesepakatan para peserta *ASEAN-China Summit* di Brunei Darussalam pada November 2001. Hal ini diikuti dengan penandatanganan naskah Kerangka Kerjasama Ekonomi (*The Framework Agreement on A Comprehensive Economic Cooperation*) oleh para peserta *ASEAN-China Summit* di Pnom Penh pada

November 2002, dimana naskah ini menjadi landasan bagi pembentukan ACFTA dalam 10 tahun dengan suatu fleksibilitas diberikan kepada negara tertentu seperi Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (http://www.aseansec.org/16646.htm - Diakses pada 12 Mei 2010).

Pada November 2004, peserta *China-ASEAN Summit* menandatangani Naskah Perjanjian Perdagangan Barang (*The Framework Agreement on Trade in Goods*) yang berlaku pada 1 Januari 2005. Berdasarkan perjanjian ini negara ASEAN 5 (Indonesia, Thailand, Singapura, Philipina, Malaysia) dan Cina sepakat untuk menghilangkan hambatan tarif 90% komoditas pada tahun 2010. Untuk negara ASEAN lainnya pemberlakuan kesepakatan ditunda hingga tahun 2015 (http://www.aseansec.org/16646.htm - Diakses pada 12 Mei 2010).

Dalam perjanjian ACFTA, terdapat kerjasama di bidang ekonomi, beberapa diantaranya adalah dalam sektor pertanian, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sumber daya manusia, investasi dan pembangunan sungai Mekong. Dalam hal ini, sektor pertanian menjadi perhatian karena selain merupakan salah satu sektor unggulan yang dimiliki oleh Indonesia juga merupakan sektor yang telah memberikan cukup banyak kontribusi bagi Indonesia.

Tercatat dalam data ekspor non-migas Indonesia terhadap Cina telah cukup banyak mengalami peningkatan, yaitu tercatat pada bulan Januari-Agustus tahun 2009 ekspor non-migas Indonesia mencapai nilai 5.2 milyar USD, sedangkan pada tahun 2010 mencapai nilai 8.2 milyar USD

(http://www.depdag.go.id/statistik_neraca_perdagangan_dengan_negara_mitra_dagang/ - Diakses pada 12 November 2010).

Memasuki bulan September tahun 2010, ekspor non-migas Indonesia meningkat tajam. Seiring dengan meningkatnya ekspor non-migas, selama semester I tahun 2010 ekspor pertanian Indonesia juga meningkat cukup tinggi dibanding ekspor pada periode tahun sebelumnya. Berita resmi BPS pada September tahun 2010 melaporkan bahwa ekspor Indonesia pada semester I meningkat sekitar 42,26% dibanding periode yang sama pada tahun 2009. Prestasi ini berasal dari kenaikan ekspor migas sebesar 73,66% dan ekspor nonmigas sebesar 36,94%. Eskpor nonmigas selama periode Januari-Juli mencapai nilai 69 milyar USD atau sekitar 82.30% dari nilai total ekspor pada periode yang sama yang mencapai 85 milyar USD. Nilai ekspor pertanian primer selama enam bulan pertama tahun 2010 mencapai nilai 2,75 milyar dolar atau meningkat 17,55% (http://bps.go.id/ - Diakses pada 23 November 2010).

Sementara nilai ekspor komoditas berbasis pertanian mencapai 11,8 milyar USD atau naik 45,60% dibanding capaian pada periode yang sama tahun 2009. Peningkatan terbesar ekspor nonmigas berasal dari karet dan barang-barang dari karet serta komoditas lemak minyak nabati dan hewan. Ekspor lemak dan minyak pada bulan semester I 2010 meningkat 19,32% dibanding capaian tahun sebelumnya. Ekspor karet dan barang dari karet melonjak 103,89% atau berlipat dua kali lebih dari capaian tahun sebelumnya (http://bataviase.co.id/node/392716 - Diakses pada 23 November 2010).

ACFTA dinilai oleh beberapa kalangan sebagai sebuah ancaman bagi Indonesia, namun lainnya mengatakan bahwa dengan adanya ACFTA merupakan peluang bagi Indonesia untuk terus meningkatkan daya saing produknya di dunia internasional terutama dalam sektor pertanian. Beberapa produk-produk pertanian Cina memang sudah masuk ke Indonesia, seperti jenis buah-buahan dan sayuran dimana jika dilihat dari segi kualitas memang cukup baik serta harga yang lebih terjangkau. Namun Indonesia dalam hal ini masih mempunyai keunggulan secara kualitas yang cukup baik dengan Cina terutama dalam produk-produk seperti, kakao atau coklat, kelapa sawit, kopi, teh, karet dan lainnya.

Disamping itu hal ini didukung oleh program Kementrian Pertanian Republik Indonesia 2010-2014, dimana disebutkan dalam salah satu poinnya adalah dengan menargetkan peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, peningkatan kesejahteraan petani, neraca perdagangan serta investasi pertanian yang merupakan sebagian program yang menjadi perhatian bagi Kementrian Pertanian (http://www.deptan.go.id/ - Diakses 09 April 2010).

Berdasarkan paparan fenomena diatas, maka timbul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap pengaruh diberlakukannya ACFTA sebagai sebuah kerjasama perdagangan antara ASEAN-Cina dan pengaruhnya terhadap devisa Indonesia dari sektor pertanian. Beberapa alasan mengapa penulis mengambil topik ini, yaitu :

1. Topik ini sangat relevan dengan disiplin ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam pembelajaran mengenai perdagangan bebas.

2. Topik ini menimbulkan rasa ingin tahu peneliti tentang dampak diberlakukannya ACFTA terhadap devisa Indonesia dari sektor pertanian serta bagaimana prospek pertanian Indonesia untuk kedepannya.

Berdasarkan pernyataan dan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian yang akan dituangkan dalam laporan penelitian dengan judul :

Dampak Penghapusan Hambatan Tarif *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) terhadap Devisa Indonesia dari Sektor Pertanian

Penelitian ini didukung oleh beberapa mata kuliah pokok yang dipelajari di Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, yaitu :

1. Pengantar Ilmu Ekonomi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar dalam mempelajari ilmu Ekonomi secara teori maupun applikasinya. Teori-teori ini dapat dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini.
2. Ekonomi Politik Internasional dan Bisnis Internasional. Kedua mata kuliah ini secara umum mengkaji tentang hubungan atau interaksi antar aktor dalam hubungan internasional berdasarkan perspektif ekonomi. Teori-teori dari mata kuliah ini dapat dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini.

3. Organisasi dan Administrasi Internasional, yang membahas mengenai peran suatu aktor non-negara dalam hubungan internasional dalam menciptakan interaksi global.
4. Hubungan Internasional Kawasan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang khusus mengkaji tentang kawasan (*Region*) serta pola interaksi diantara para aktor dalam hubungan internasional yang terjadi di dalamnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan melihat pada pernyataan sebelumnya maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemberlakuan penghapusan hambatan tarif ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) terhadap negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia ?
2. Bagaimana kondisi Neraca Perdagangan (*Trade Balance*) sektor pertanian Indonesia terhadap Cina pada sebelum dan sesudah diberlakukannya ACFTA ?
3. Seberapa besar kontribusi yang diberikan dari pemberlakuan ACFTA terhadap perdagangan komoditas pertanian Indonesia-Cina ?

1.3 Pembatasan Masalah

Dikarenakan luasnya permasalahan yang akan diteliti, maka berdasarkan yang telah di uraikan sebelumnya penelitian ini akan dibatasi pada kajian terhadap pengaruh diberlakukannya ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) terhadap devisa Indonesia dari sektor pertanian.

Dalam hal ini akan dibatasi pada pembahasan mengenai perkembangan perdagangan dari sektor pertanian Indonesia terhadap Cina baik sebelum dan sesudah diberlakukannya ACFTA, upaya atau langkah yang dilakukan oleh Indonesia dalam meningkatkan daya saing pertanian Indonesia serta dampaknya terhadap devisa Indonesia dari sektor pertanian.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari hasil uraian identifikasi dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

Bagaimana kontribusi dari pemberlakuan ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) yang berupa penghapusan hambatan tarif perdagangan bagi komoditas pertanian terhadap devisa Indonesia dari sektor pertanian ?

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan meneliti proses pemberlakuan ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) terhadap negara-negara ASEAN khususnya Indonesia.
2. Mengetahui dan meneliti kebijakan dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dan khususnya Kementrian Pertanian Indonesia dalam meningkatkan daya saing komoditas pertanian Indonesia di dalam ruang lingkup ACFTA.
3. Mengetahui dan meneliti kontribusi apa yang diberikan ACFTA terhadap devisa Indonesia dari sektor pertanian.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan teori-teori dalam ilmu hubungan internasional serta dapat memberikan wawasan bagi para peneliti dan para akademisi ilmu hubungan internasional.
2. Sebagai sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu hubungan internasional dan menambah wawasan mengenai ekonomi internasional dan perdagangan bebas.
3. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan penelitian yang berpedoman pada metode dan teknik yang

sifatnya ilmiah sekaligus sebagai syarat bagi peneliti dalam menyelesaikan studi ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia.

1.6 Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Definisi Operasional

1.6.1 Kerangka Pemikiran

Dewasa ini hubungan internasional telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada dasarnya hubungan internasional mengacu pada seluruh bentuk interaksi hubungan antar negara. Hubungan yang terjadi di negara-negara tersebut dapat berupa hubungan kerjasama atau merupakan hubungan konflik atau persaingan. Sama halnya dengan individu bahwa negara juga membutuhkan suatu hubungan, karena tidak dapat hidup sendiri dan tentunya mempunyai kelemahan atau kekurangan sehingga perlunya hubungan dengan negara lain yang mungkin dari sanalah upaya sebuah negara dalam memenuhi kebutuhan nasionalnya serta dapat tercapainya suatu kepentingan bersama.

Tujuan utama studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu pelaku para aktor, baik itu negara maupun non-negara dalam arena interaksi internasional. Dalam pemahaman bahwa setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhan nasionalnya sendiri tetapi melibatkan negara-negara yang lainnya sehingga membentuk interaksi internasional. Dalam hubungan internasional, interaksi yang terjadi antar aktor dapat dikenali karena intensitas keberulangannya (*recurrent*) sehingga membentuk suatu pola tertentu. Secara

umum bentuk reaksi dari suatu negara terhadap negara lain dapat berupa akomodasi (*accommodate*), mengabaikan (*ignore*), berpura-pura seolah-olah informasi atau pesan dari negara lain belum diterima (*pretend*), mengulur-ulur waktu (*procastinate*), menawar (*bargain*) dan menolak (*resist*) aksi dari negara lain (Perwita & Yani, 2005: 42).

Tentunya dalam setiap interaksi antar negara yang terjadi, bahwa setiap negara akan memperjuangkan kepentingan-kepentingannya terhadap negara lainnya. Interaksi tersebut kemudian akan mempertemukan berbagai bentuk politik luar negeri dari masing-masing negara yang terlibat di dalamnya. Pertemuan dari politik luar negeri berbagai negara ini disebut politik internasional.

Politik Internasional merupakan salah satu kajian pokok dalam Hubungan Internasional. Politik Internasional merupakan salah satu wujud dari interaksi dalam Hubungan Internasional. Bentuk-bentuk interaksi berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan antara lain dibedakan menjadi hubungan bilateral, trilateral, regional dan multilateral. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa suatu hubungan atau interaksi dapat berupa hubungan kerjasama, dalam hal ini adalah kerjasama internasional.

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat internasional yang saling bergantung satu sama lain serta suatu usaha dari masing-masing masyarakat internasional untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama. Dalam melakukan kerjasama tersebut diperlukan suatu wadah yang dapat memperlancar suatu kerjasama tersebut. Tujuan dari kerjasama tersebut

adalah ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat.

Salah satu konsep utama yang dapat dipakai untuk menggambarkan sifat sistem internasional saat ini adalah konsep interdependensi. Konsep ini menyatakan bahwa negara bukan aktor independen secara keseluruhan, malah negara saling bergantung satu sama lainnya. Tidak ada satu negara pun yang secara keseluruhan dapat memenuhi sendiri kebutuhannya.

Menurut Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani dalam *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa :

> "Interdependensi itu sebenarnya merupakan turunan dari perspektif liberalisme yang terdapat dalam studi Hubungan Internasional. Liberalisme Interdependensi memiliki asumsi bahwa modernisasi akan menigkatkan tingkat interdependensi antar negara. Aktor transnasional menjadi semakin penting, kekuatan militer merupakan instrumen yang tidak absolut dan kesejahteraan merupakan tujuan yang dominan dari negara. Interdependensi kompleks akan menciptakan dunia hubungan internasional yang jauh akan lebih kooperatif" (2005: 78).

Saling ketergantungan (interdependensi) dapat terjadi dalam berbagai isu, seperti ekonomi, politik dan sosial. Dalam mengamati fenomena interdependensi, terdapat beberapa sektor ekonomi dan politik dalam hubungan interdependensi antar negara, salah satunya yaitu sektor perdagangan. Sektor perdagangan merupakan sektor penting dalam memahami ketergantungan ekonomi. Hubungan ekonomi melalui perdagangan dapat berubah dan perubahan tersebut dapat mempengaruhi interdependensi.

Transaksi perdagangan memiliki implikasi besar terhadap interdependensi dibandingkan transaksi internasional yang melibatkan pertukaran informasi antar pemerintah. Antar negara akan terjadi mutual dependent dalam hal barang dan

jasa yang tidak dapat diproduksi oleh mereka sendiri. Interdependensi ini semacam ini akan sangat merugikan apabila diputuskan hubungannya. Berangkat dari hal tersebut maka konsep ini berelasi dengan konsep hubungan dalam sebuah kawasan (2005 : 78).

Regionalisme merupakan salah satu konsep dalam ilmu hubungan internasional dimana hal ini berkaitan erat dengan fenomena globalisasi yang di satu sisi menjadikan dunia lebih kecil dan memungkinkan terjadinya penyatuan wilayah baik dalam arti geografi, ekonomi, politik dan budaya.

Beberapa teori yang mengklasifikasikan suatu kawasan, *Pertama*, negara-negara yang tergabung dalam suatu kawasan memiliki kedekatan geografis. *Kedua*, memiliki kemiripan sosiokultural. *Ketiga*, terdapatnya kemiripan dan sikap dan tindakan politik. *Keempat*, kesamaan keanggotaan dalam organisasi internasional. Dan *kelima*, adanya ketergantungan ekonomi yang diukur dari perdagangan luar negeri.

Menurut Louis Cantori dan Steven Spiegel kawasan adalah adanya hubungan atau interaksi antara dua negara atau lebih dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan sosial dan sejarah. (2005: 104).

Kerjasama antar negara-negara yang berada dalam suatu kawasan untuk mencapai tujuan regional bersama adalah salah satu tujuan utama mengemukanya konsep ini. Dengan membentuk organisasi regional dan atau menjadi anggota organisasi regional, maka negara-negara tersebut telah menggalang bentuk kerjasama intra-regional.

Bentuk tertinggi dari kerjasama semacam ini adalah integrasi ekonomi. Bentuk integrasi ini terbagi dalam dua tingkat. Tingkat pertama disebut dengan "integrasi dangkal" (*shallow integration*) yang hanya mengacu kepada upaya regional untuk mengurangi atau menghapuskan kendala-kendala perdagangan. Tingkat kedua yaitu "integrasi dalam" (*deep integration*) yang bertujuan untuk mencapai kesatuan ekonomi dan fiskal secara menyeluruh (*full economic and monetary union*). (2005 : 108).

Perdagangan bebas juga dapat dikatakan sebagai produk dari perjanjian internasional (*International Agreement*). Perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Pembuatan Perjanjian Internasional dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu Perundingan (*negotiation*), Penandatanganan (*signature*) dan Pengesahan (*ratification*).

Perjanjian internasional dapat muncul dari adanya kerjasama internasional, hal ini terbagi ke dalam *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti suatu kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu, seperti perjanjian dwi kewarganegaraan, perbatasan, perdagangan dan pemberantasan penyelundupan. Sedangkan *Law Making Treaties* dimaksudkan perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional, seperti Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang Tahun 1949. (Rudy, 2006 : 44-45)

Secara umum ekonomi-politik internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dengan politik internasional yang muncul akibat berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam sistem internasional.

Ekonomi-politik internasional dapat juga diartikan sebagai interaksi global anatara politik dan ekonomi. Ekonomi-politik internasional menurut Robert Gilpin adalah :

> "Bahwa konsep ekonomi-politik merupakan sebuah dinamika interaksi global antara pengejaran kekuasaan (politik) dan pengejaran kekayaan (ekonomi), dimana dalam hal ini adalah terdapatnya hubungan timbal balik antara politik dan ekonomi. Negara dan pasar saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan dan kekayaan dalam hubungan internasional" (2005: 76).

Free Trade atau perdagangan bebas dapat didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda yang merupakan salah satu bentuk perwujudan dari kerjasama internasional. Dimana para aktor yang terlibat pada umumnya adalah negara yang mempunyai kepentingan bersama, dalam hal ini adalah ekonomi. Saat ini faktor ekonomi menjadi faktor yang sangat penting dan dapat menentukan proses politik dan sebaliknya. Hubungan faktor ekonomi dan politik serta antara negara dengan pasar saling bergantung antara keduanya ini tidak dapat dipisahkan.

Pasar bebas (*free market*) merupakan sejarah panjang dari politik Perdagangan bebas (*free trade*), yang tidak lain merupakan hal yang bertolak belakang dari politik ekonomi merkantilisme. Sebuah paham yang meyakini

bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital (*mineral berharga, terutama emas maupun komoditas lainnya*) yang dimiliki oleh Negara.

Dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah impor sebisa mungkin, sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif. Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan suatu negara harus mencapai tujuan ini dengan melakukan proteksi terhadap perekonomiannya dengan mendorong ekspor dan mengurangi import (*biasanya dengan pemberlakuan tarif dan pajak yang besar*). Kebijakan ekonomi yang bekerja dengan mekanisme seperti inilah yang dinamakan dengan sistem ekonomi merkantilisme.

Namun dalam perkembangannya, politik merkantilisme ini dianggap menjadi suatu skema sistem ekonomi yang tidak efektif. Hal tersebut disebabkan oleh campur tangan negara yang dianggap terlalu besar, sehingga membuat sistem perdagangan mengalami stagnasi. Salah satu kritikus terhadap politik merkantilisme ini adalah Adam Smith. Smith mengatakan bahwa :

> "Bahwa hukum pasar tidak boleh dikekang, oleh karena itu, pasar harus dibuka seluas-luasnya dengan meminggirkan peran negara, yang cenderung membatasi individu (private)". (Skousen, 2005 : 20-21).

Smith percaya bahwa kompetisi dalam pasar bebas akan bertujuan menguntungkan masyarakat seluruhnya dengan memaksa harga tetap rendah, dimana tetap membangun dalam insentif untuk bermacam barang dan jasa. Smith sangat mengkritik keras upaya monopoli negara yang justru membatasi ekspansi

industri. Negara bagi Smith terlalu jauh melakukan intervensi dalam proses ekonomi, salah satunya dalam hal penentuan tarif. Intervensi tarif ini dianggap membuat inefisiensi dan harga tinggi pada jangka panjang. Teori ini kemudian dikenal dengan "*laissez-faire*", yang berarti "biarkan mereka lakukan", tanpa pembatasan serta intervensi dari Negara.

Pemerintah telah membangun kesepakatan internasional dengan Cina terkait dengan area perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dan Cina atau yang kita sering sebut dengan *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA). Perjanjian dan kesepakatan internasional terkait perdagangan bebas, kini gencar dilakukan oleh Pemerintah. Indonesia sendiri telah menyepakati area perdagangan bebas, diantaranya ; *ASEAN Free Trade Agreement* (AFTA), Indonesia - Jepang EPA, ASEAN – China FTA, ASEAN – Korea FTA. Sedangkan yang masih dalam tahap perundingan adalah ASEAN – India FTA, ASEAN – EU FTA, ASEAN – Australia – New Zealand FTA. Sementara zona perdagangan bebas antara Indonesia – AS FTA dan Indonesia – EFTA (Swis, Leichestein, Norwegia dan Eslandia), masih dalam proses Pra-negosiasi dan *Joint Study Group*. Dan salah satu yang menyita banyak perhatian hari ini adalah kesepakan zona perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN (termasuk Indonesia) dengan Cina.

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi alasan utama mengapa kesepakatan ACFTA ini diambil, yakni *Pertama*, penurunan dan penghapusan tarif serta hambatan non-tarif di Cina membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan volume dan nilai perdagangan ke negara yang penduduknya terbesar dan memiliki

tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. *Kedua,* penciptaan rezim investasi yang kompetitif dan terbuka membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi dari Cina. Dan *Ketiga*, peningkatan kerjasama ekonomi dalam lingkup yang lebih luas membantu Indonesia melakukan peningkatan *Capacity Building*, *Technology Transfer* dan *Managerial Capability*.

Berbicara mengenai perdagangan bebas, maka tentunya ada hal yang tidak dapat dipisahkan selain kegiatan ekspor dan impor semata, yaitu devisa. Devisa adalah semua barang yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Devisa terdiri atas valuta asing, yaitu mata uang yang dapat diterima oleh hampir semua negara di dunia (seperti US Dollar, Yen Jepang, Euro, Poundsterling Inggris), emas, surat berharga yang berlaku untuk pembayaran internasional, dan lainnya (Amalia, 2007 : 34).

Devisa dapat bersumber dari pinjaman atau hutang luar negeri, hadiah, bantuan atau sumbangan dari luar negeri, penerimaan deviden serta bunga dari luar negeri, hasil ekspor barang dan jasa, kiriman valuta asing dari luar negeri, wisatawan yang berbelanja di dalam negeri dan lainnya. Adapun jenis-jenis devisa, yaitu *pertama*, devisa umum, adalah devisa yang didapat dari kegiatan ekspor, penjualan jasa serta bunga modal, *kedua*, Devisa Kredit, adalah devisa yang diperoleh dari kredit pinjaman luar negeri.

Dalam penelitian ini, pertanian menjadi salah satu variabel yang akan diteliti, dimana erat kaitannya dengan devisa Indonesia yang dihasilkan dari sektor pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati

yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa difahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (bahasa Inggris : *crop cultivation*) serta pembesaran hewan ternak (*raising*), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor unggulan yang dimiliki oleh Indonesia dimana sektor ini telah memberikan kontribusi yang cukup banyak bagi Indonesia.

Sejak bergulirnya ACFTA pada awal tahun 2010, menjadikan dilema tersendiri bagi Indonesia. Di satu sisi banyak muncul kekhawatiran akan ancaman terhadap produk-produk lokal serta tenaga kerja di Indonesia, namun di sisi lain ini merupakan suatu kesempatan untuk Indonesia membuka peluang investor serta perdagangan yang lebih luas lagi cakupannya yaitu ASEAN dan Cina.

1.6.2 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang ada dan kerangka konseptual diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

“Pemberlakuan ACFTA berupa penghapusan hambatan tarif telah berdampak terhadap pendapatan devisa Indonesia dari sektor pertanian, hal

ini terlihat dari meningkatnya nilai surplus komoditas pertanian Indonesia terhadap Cina".

1.6.3 Definisi Operasional

Mengacu kepada pembatasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang akan dijabarkan disini adalah variabel independen yang dalam hal ini adalah pengaruh ACFTA dan variabel dependen, yaitu devisa Indonesia.

Variabel independen, yaitu ACFTA. Konsepsi mengenai variabel ini terdiri atas :

- Hambatan adalah rintangan, halangan atau sesuatu yang mengganggu kelancaran (Novia, 2010 : 188).
- Tarif adalah harga, pajak atau ongkos yang dibebankan terhadap suatu objek (2010 : 572).

Variabel Dependen, yaitu Devisa Indonesia dari Sektor Pertanian. Konsepsi mengenai hal ini terdiri dari :

- Devisa adalah semua benda yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional (Amalia, 2007 : 34).
- Sektor adalah lingkungan suatu usaha (2010 : 539).
- Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan

hidupnya (http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian - Diakses 20 November 2011).

- Surplus adalah sesuatu yang berkelebihan (2010 : 564).

1.7 Metode dan Teknik Penelitian

1.7.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif-Analitis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Deskripsi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang akurat dan terperinci mengenai fakta tentang suatu fenomena yang ada. Metode Deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti. Sedangkan Analitis adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja untuk mengetahui sesuatu atas sebuah fenomena.

Metode Deskriptif-Analitis bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang terkumpul. Dengan metode ini diharapkan peneliti dapat menggambarkan dan menelaah serta menganalisa fenomena yang ada untuk dituangkan ke dalam pembahasan yang bersifat ilmiah.

1.7.2 Teknik Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu melalui pengumpulan dan pemilihan data-data sekunder yang

diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, internet serta bahan-bahan tertulis lainnya.

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.8.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi, yaitu :

1. Direktorat Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
2. Direktorat Jenderal Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian (PPHP), Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta.
3. Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Jakarta.
4. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
5. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Bandung.
6. Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bandung.
7. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Jatinangor - Sumedang.

1.8.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan Februari 2012, yang dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1

Tabel Kegiatan Penelitian

Oktober 2010 – Februari 2012

Kegiatan	Waktu Penelitian									
	2010			2011					2012	
	Okt	Nov	Des	Jul - Des					Jan	Feb
Pengajuan Judul										
Pembuatan Usulan Penelitian										
Seminar Usulan Penelitian										
Bimbingan Skripsi										
Pengumpulan Data										
Rencana Sidang										

1.9 Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi dengan urutan sebagai berikut :

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan memparkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah. Selanjutnya akan dipaparkan kerangka pemikiran dan teknik penelitian serta lokasi dan waktu penelitian.

BAB II : Bab ini memaparkan tinjauan kepustakaan dari literatur-literatur yang dipilih untuk menjelaskan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang diteliti.

BAB III : Bab ini akan memaparkan mengenai variabel-variabel yang akan di deskripsikan yaitu mengenai ACFTA yang meliputi sejarah, pemberlakuan, tujuan dan hal-hal yang lainnya. Selain itu akan dipaparkan juga mengenai gambaran umum mengenai pertanian Indonesia dan program-program yang dilakukan oleh Indonesia dalam sektor pertanian.

BAB IV : Bab ini akan memaparkan hasil penelitian dari hubungan antar variabel yaitu mengenai dampak diberlakukannya penghapusan hambatan tarif dalam ACFTA terhadap devisa Indonesia yang berasal dari sektor pertanian. Selain itu akan dipaparkan juga mengenai perkembangan devisa Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya ACFTA.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian yang dilakukan, meliputi penolakan atau penerimaan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, serta saran-saran bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengamati objek penelitian yang serupa.